

MENUJU SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

*M. Dawam Rahardjo
LSAF Jakarta
dawamraharjo@yahoo.com*

This article proposes to elaborate on the development of Indonesian economic system since the independence to the more recently, known as Pancasila Economic System. Mubyarto identifies some characteristics of the system as follow. Firstly, economic wheel is driven by economic, moral and social incentives. Secondly, based on humanity principle, egalitarianism is a strong will of all people to reach equality. Thirdly, the priority of economic policy is to create strong national economy, meaning that nationalism has been a spirit of every economic policy. Fourthly, cooperative society is the backbone of economy and the most concrete form of economic cooperation. Finally, there must be a balance of planning between that in national and decentralization levels in implementing economic activities to reach economic and social justice.

Keywords: economic system, characteristics, national, decentralization, justice.

Pendahuluan

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi Indonesia secara komprehensif dimulai oleh Mohammad Hatta dengan buku kecilnya yang berjudul "Ekonomi Terpimpin" terbit pada tahun 1967. Dalam pemikirannya itu Hatta mengacu kepada pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 beserta penjelasannya. Namun konsep itu tidak dikembangkan lebih lanjut menjadi dokumen resmi mengenai suatu sistem ekonomi yang dianut oleh negara walaupun berbagai aspek dalam konsep itu sudah mencerminkan realitas yang berlaku dalam perekonomian Indonesia. Namun

konsep itu tidak sempat menjadi wacana publik sehingga tidak diketahui derajat penerimaan masyarakat dan negara terhadap konsep itu.

Pada waktu yang bersamaan ketika buku itu ditulis, di Indonesia berlaku sistem Ekonomi Terpimpin yang berdampingan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam persepsi masyarakat, yang memimpin orde ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut Demokrasi Terpimpin yang mengandung otoritarianisme, bahkan kediktatoran. Di dalamnya terkandung unsur kontrol, komando dan perencanaan terpusat yang kesemuanya bergabung menjadi dirigisme. Sementara itu konsep Hatta

berbeda, karena Ekonomi Terpimpin adalah orde ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi. Namun karena yang berlaku pada waktu itu adalah Ekonomi Terpimpin dalam model dirigisme di bawah komando Bung Karno, maka dalam persepsi publik, Ekonomi Terpimpin adalah orde ekonomi yang dipimpin oleh Demokrasi Terpimpin itu. Dalam pengertian Hatta, Ekonomi Terpimpin adalah orde ekonomi yang dipimpin oleh pasal-pasal ekonomi UUD 1945. Citra publik itu ikut serta menyisihkan konsep Ekonomi Terpimpin Bung Hatta dari wacana publik.

Sejak tahun 1967, Pemerintah Indonesia yang disebut sebagai Pemerintah Orde Baru, mulai menjalankan suatu strategi pembangunan yang komprehensif berdasarkan TAP MPRS NO. XXIII/1966 tentang "Pembaharuan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan" yang menjadi landasan legalnya.

Sekalipun tidak disebut dianutnya suatu sistem ekonomi tertentu, namun dalam konsep pembangunan itu terkandung unsur-unsur sistem ekonomi, misalnya landasan ideologi dan hukum, lembaga-lembaga ekonomi, pranata ekonomi dan sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan. Karena itu secara implisit, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan suatu sistem ekonomi tertentu, tapi masih bersifat arsitektural. Corak yang menonjol ada dua. Pertama adalah gagasan ekonomi liberal yang tercermin dalam kebijaksanaan liberalisasi ekonomi, sebagaimana tercermin dalam Peraturan 3 Oktober 1967, UU Penanaman Modal Asing, 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri, 1968. Kedua adalah dilaksanakannya sistem perencanaan terpusat (*centralized planning system*) yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga mencerminkan suatu

sistem yang dualistis sebagai suatu perpaduan antara gagasan liberal dan keterpimpinan atau dirigisme. Selanjutnya Pemerintah mendorong tiga sektor ekonomi sekaligus, sektor swasta, sektor negara dan sektor koperasi yang juga mencerminkan upaya pemaduan unsur-unsur berbagai sistem ekonomi .

Ekonomi Pancasila

Menurut Emil Salim, dalam perkembangannya sejak 1945, sistem ekonomi Indonesia bergerak dari kiri dan kekanan mengikuti gerak bandul jam. Mula-mula mengarah kepada haluan sosialis, tetapi kemudian berbalik ke kanan, ke haluan liberal. Sejak Orde Baru gerak bandul jam itu diusahakan untuk diseimbangkan, sehingga akhirnya pada akhir dasawarsa '70-an dicapai titik keseimbangan menjadi Sistem Ekonomi Pancasila. Pemikiran itu dituangkan oleh Emil Salim dalam suatu artikelnya yang dimuat dalam jurnal ilmiah "Prisma" tahun 1979.

Sebenarnya pada tahun 1965 Emil Salim sudah menulis suatu artikel pendek di Harian Kompas tentang Sistem Ekonomi Pancasila. (SEP). Tapi tulisan itu tidak direspon publik, mungkin karena risiko politik yang dirasakan oleh kalangan akademis pada waktu itu. Tapi tulisan itu masih bersifat umum yang menyebut unsur aksiologi saja. Baru kemudian pada tahun 1979, ketika risiko politik sudah bisa diperhitungkan, Emil Salim mengembangkan lebih lanjut gagasannya itu, dengan membahas aspek ontologinya, tapi kurang membahas landasan epistemologinya. Namun artikel itu juga tidak mendapat respon publik. Baru pada bulan Nopember 1980, dalam rangka Dies Natalis UGM, Fakultas Ekonomi-UGM menyelenggarakan sebuah seminar besar mengenai Ekonomi Pancasila yang dipimpin oleh Mubyarto-Boediono. Seminar itu

sebenarnya lebih merupakan refleksi kritis terhadap sistem ekonomi yang berlaku sehingga termasuk menggugat teori-teori ekonomi yang konvensional, yang pada pokoknya dinilai bebas nilai.

Cukup banyak sumbangan pemikiran yang dapat dihimpun baik dari kalangan dalam FE-UGM maupun kalangan luar. Dan kemudian cetusan gagasan yang bersifat menggebrak itu mendapat respon yang cukup luas dari kalangan akademisi dan intelektual. Tanggapan kritis misalnya datang dari Arief Budiman, Sarbini Sumawiyata dan Sjahrir. Arief Budiman misalnya melontarkan kritik bahwa konsep SEP tidak didasarkan pada konsep manusia yang jelas. Dalam kapitalisme misalnya, landasan teori manusianya tercermin dalam asumsi *homo-economicus*, sedangkan dalam Sosialisme, landasan teorinya adalah konsep *homo socius*. Karena itu maka Arief Budiman cenderung untuk menganut Sosialisme sebagai sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Sarbini juga mengatakan, bahwa SEP itu tidak memiliki landasan teori yang jelas dan juga menganggap bahwa yang sudah jelas landasan teorinya sebagai alternatif terhadap kapitalisme adalah Sosialisme. Namun yang dimaksud oleh Sarbini adalah Sosialisme yang cocok untuk Indonesia, yaitu Sosialisme Kerakyatan yang ditawarkan oleh St. Sjahrir, pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pada tahun 1985 Sarbini lebih mengkonkretkan konsep Sosialisme Kerakyatan pada tingkat kebijaksanaan menjadi konsep Ekonomi Kerakyatan dalam suatu tulisannya di jurnal Prisma. Tapi Ekonomi Kerakyatan bukan suatu sistem ekonomi, melainkan politik ekonomi.

Dalam rangka untuk mengembangkan konsep SEP, Mubyarto melakukan prakarsa untuk membentuk lembaga Pusat Kajian Ekonomi Pancasila (PUSTEP) sebagai

sebuah lembaga khusus di lingkungan UGM yang dibentuk dengan SK Dirjen DIKTI. Namun dengan wafatnya Prof. Mubyarto, nama lembaga ini diganti atas dasar keputusan Rektor UGM menjadi Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan, yang menimbulkan kesan bahwa SEP itu intinya adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai lawan dari Sistem Ekonomi Neo-liberal. Padahal menurut Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan hanyalah merupakan bagian dari SEP. Perekonomian rakyat adalah salah satu sektor ekonomi dalam SEP. Yang soko-gurunya adalah koperasi.

Sistem ekonomi sendiri, dengan mengacu kepada Sistem Ekonomi Kapitalis, menurut Marx Weber-Maxin Rodinson, adalah suatu entitas yang terdiri dari empat komponen. Pertama adalah mentalitas yang tercermin sistem nilai yang dirumuskan dalam norma-norma ekonomi. Menurut Weber, norma-norma ekonomi itu bersumber pada etika ekonomi. Sedangkan etika ekonomi dibentuk oleh tiga faktor, yaitu kesejarahan, agama dan geografi ekonomi. Sedangkan norma ekonomi itu mencakup konsep-konsep atau persepsi-persepsi pertama mengenai kerja, kedua tentang kekayaan, ketiga tentang perdagangan, keuangan dan industri, keempat tentang perubahan ekonomi dan inovasi teknis, kelima berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi serta keenam sikap terhadap mereka yang tidak memiliki sumberdaya ekonomi atau karitas. Mentalitas juga dicerminkan oleh sikap-sikap terhadap perubahan, otoritas, kompetisi, orang asing, dan sikap terhadap penghematan. Sikap-sikap itu jika menjadi perilaku kolektif akan menjadi suatu sikap budaya (lihat bagan 1)

Dalam wacana mengenai sistem ekonomi Indonesia, sering disebut azas usaha bersama, kekeluargaan dan tradisi gotong rakyat atau tolong menolong di

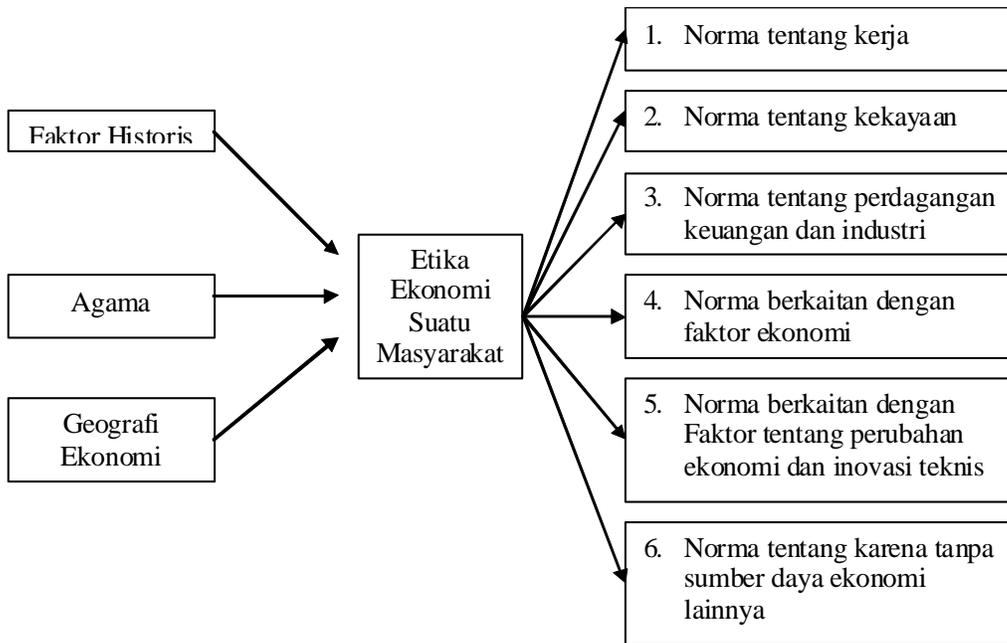
kalangan rakyat terutama di pedesaan. Azas kekeluargaan ini malahan tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1 sebagai azas dalam susunan perekonomian Indonesia. Hanya saja azas ini dalam realitas lebih banyak berlaku dalam kegiatan sosial, misalnya, dalam mendirikan rumah, membangun jalan atau dalam mengatasi bencana alam. Namun di bidang ekonomi mentalitas ini nampak pada kecenderungan untuk berkoperasi sejak akhir abad 19 yang digerakkan secara besar-besaran oleh Pemerintah di masa Orde Baru.

mendorong atau menghambat pembangunan ekonomi.

Kedua adalah struktur kelembagaan yang mengemban fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan sistem, misalnya lembaga perencanaan, bank sentral, departemen keuangan, perusahaan-perusahaan swasta, negara dan koperasi, pasar modal, badan pengawas keuangan negara atau lembaga perasuransian

Ketiga adalah pranata ekonomi yang tercermin dalam UU, Peraturan, pengelolaan

Bagan 1 : Struktur norma-norma ekonomi



Mentalitas, dalam kaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi banyak dibahas dalam buku Athur Lewis "The Theory of Economic Growth" (1956), demikian pula dalam buku Francis Fukuyama "Trust" (1996). Yaitu nilai-nilai yang

ekonomi (*economic governance*). dan etika ekonomi. Dalam kaitan ini bisa disebut adanya tiga macam sistem kapitalisme menurut Weber, yaitu kapitalisme tradisional, kapitalisme politik dan kapitalisme rasional dalam kaitannya dengan cara

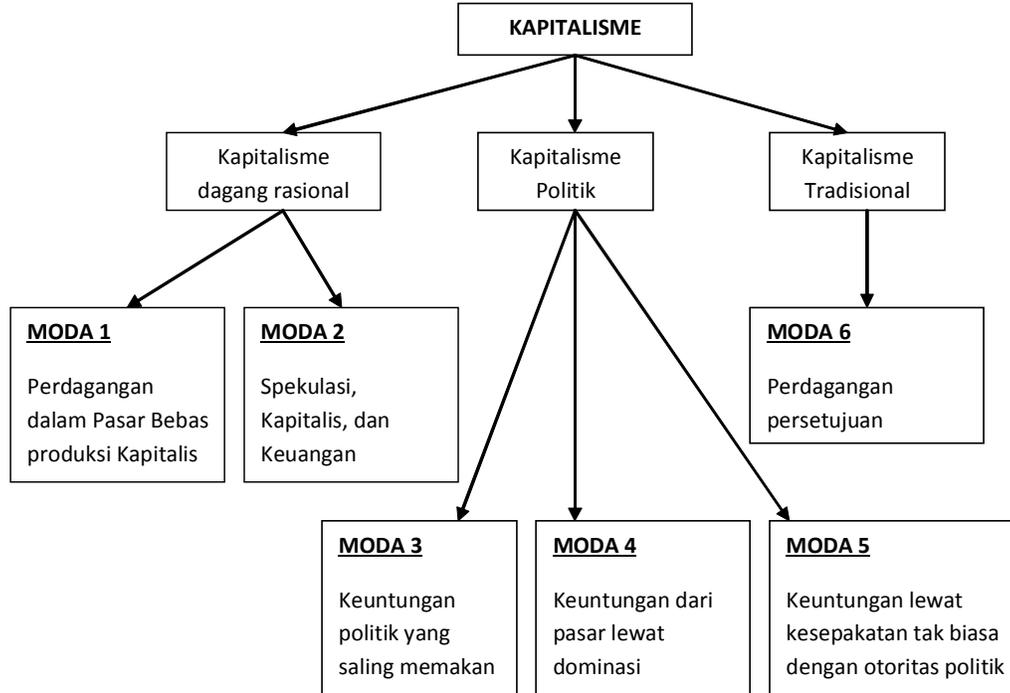
bagaimana mencari keuntungan. Dalam sistem kapitalisme tradisional, keuntungan diperoleh melalui persetujuan keuangan tradisional. Dalam sistem kapitalisme politik keuntungan diperoleh melalui, hubungan politik yang predatoris, hubungan dominasi dan eksploitasi, serta kesepakatan tak biasa dengan otoritas politik. Sedangkan dalam sistem kapitalisme rasional keuntungan diperoleh melalui perdagangan dalam pasar bebas atau produksi untuk pasar yang mengandung spekulasi kapitalis dan keuangan. Menurut Weber, sistem kapitalis berkembang dari tradisional, politik dan akhirnya rasional yang merupakan sistem kapitalis kontemporer. Namun dalam suatu periode ketiga sistem itu dalam realitas bisa tercampur yang mengandung ketiga unsur kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi (*economic governance*). (lihat bagan 2).

Keempat adalah sektor-sektor ekonomi, misalnya sektor swasta, sektor negara dan sektor koperasi atau yang bersifat dualistik, misalnya desa-kota, formal-informal, modern-tradisional, atau skala besar-kecil yang membagi dua atau lebih sektor-sektor kegiatan produktif atau sektor riil.

Selain itu dengan mengacu kepada pandangan Arief Budiman yang disetujui juga oleh Mubyarto dan Boediono, maka, kelima, setiap sistem ekonomi harus pula didasari oleh konsep tentang manusia. Sarino Mangunpranoto berpendapat bahwa asumsi manusia Indonesia juga mencakup konsep *homo religius* atau *homo ethicus*.

Keenam, karena setiap sistem itu memiliki tujuan, maka Sistem Perekonomian Indonesia harus pula mengandung komponen tujuan, misalnya masyarakat adil

Bagan 2 : Tiga sistem kapitalisme



dan makmur menurut Mukaddimah UUD 1945 atau Kesejahteraan Sosial menurut judul Bagian XIV UUD 1945. Bisa juga mengacu kepada tujuan Proklamasi Kemerdekaan yaitu kebebasan ekonomi, kedaulatan ekonomio, persatuan ekonomi, keadilan ekonomi dan kemakmuran ekonomi

Sementara itu Keneth Boulding dalam pembahasannya mengenai kebijaksanaan ekonomi menyebut beberapa tujuan, seperti pertumbuhan, stabilitas, kebebasan, keadilan dan pemerataan. Dalam konteks sekarang bisa disebut tujuan perkembangan

yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Sistem ekonomi pada umumnya dipahami sebagai sistem ekonomi yang universal, seperti Merkantilisme, kapitalisme atau sistem ekonomi liberal *laizzes faire*, sosialisme, sosial demokrasi, sistem pasar sosial atau sistem ekonomi Islam. Namun dalam praktik, berbagai unsur sistem itu bercampur, misalnya menjadi sistem perekonomian campuran (*mixed-economy*). Atau konvergensi antara dua kutub ekstrem, yaitu kapitalisme dan sosialidsme. Dalam

Tabel 1 Model sistem ekonomi

Ciri-ciri	Ekonomi Swasta	Ekonomi Kontrol	Ekonomi Kolektif/ Sosialis	Ekonomi Perencanaan Sentral
1. Kebebasan memilih Barang-barang	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas, tak penuh
2. Kebebasan memilih lapangan kerja	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas, tak penuh
3. Milik alat-alat produksi	Swasta	Campur	Kolektif	Negara
4. Tanggung jawab manajer kepada :	Pemegang saham	Campur	Buruh	Negara
5. Surplus untuk :	Pemegang saham	Campur	Buruh	Negara
6. Prinsip pengatur perusahaan	Profit Max. MC=MR	MC-MR dan Cost Plus	Laba maksimal per buruh	Negara
7. Pembentukan harga : barang konsumsi, barang produksi	Pasar Pasar	Pasar Pasar	Pasar Pasar	Negara Pasar
8. Penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi	Swasta	Badan Pusat Perencanaan	Badan Pusat Perencanaan	Badan Pusat Perencanaan
9. Stabilitas	Tak terkendali	Dikendalikan oleh Badan Pusat Perencanaan	Dikendalikan oleh Badan Pusat Perencanaan	Dikendalikan oleh Badan Pusat Perencanaan

Sumber: (*Ekonomi Pancasila; Prof Dawam Rahardjo; Aditya Media Yogyakarta; Cetakan Pertama; September 2004*)

suatu makalah kajiannya pada tahun 1965, Enil Salim menyebut istilah model sistem yang mengandung empat varian, yaitu model sistem swasta, model kolektif, model komando dan model perencanaan terpusat. Setiap model mengandung prinsip-prinsip tertentu tentang 1) kebebasan dalam memilih lapangan kerja, 2) kebebasan dalam memilih barang-barang konsumsi, 3) pemilikan terhadap alat-alat produksi, 4) tanggung jawab manajemen, 5) peruntukan laba, 6) pengaturan pengusaha, 7) pembentukan harga barang konsumsi dan produksi 8) penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi dan 9) pengendalian stabilitas ekonomi.

Lagi-lagi dalam praktek, setiap model sistem mengabdung prinsip-prinsip yang dicampur dari berbagai model dan berbagai model itu dicampur dalam suatu sistem ekonomi nasional. Karena itu guna membedakan pengertian antara sistem ekonomi universal, model sistem dan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek itu, maka akan diikuti pandangan Arief Budiman yang memakai istilah "Sistem Perekonomian" dalam menyebut istilah Sistem Perekonomian Pancasila karena mengacu pada konsep sistem dalam realitas atau dalam praktek.

Mubyarto sendiri sebenarnya menyebut Sistem Ekonomi Pancasila, sebagai model sistem ekonomi nasional atau Sistem Ekonomi Indonesia (SEI). Istilah itu juga sesuai dengan pandangan Sumitro Djojohadikusumo yang pernah menulis sebuah buku kecil berjudul Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam pandangan Sumitro, Sistem Ekonomi Pancasila adalah penjabaran dan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Sumitro memandang Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sebuah konsep normatif berdasarkan ideologi yang dianut

resmi di Indonesia.

Sistem ekonomi yang berlaku terbentuk karena keputusan politik misalnya melalui konstitusi atau ditetapkan melalui UU. Namun sistem ekonomi suatu masyarakat, bangsa atau negara itu dibentuk oleh tiga faktor. Pertama adalah faktor sejarah, misalnya pra-kapitalis, masa kolonial, kapitalis atau sosialisme. Bisa juga tahap agraris, industrial atau pasca industrial. Kedua, oleh keyakinan, agama atau ideologi yang dianut di Indonesia Pancasila. Ketiga, oleh faktor geografi ekonomi, misalnya wilayah benua atau kepulauan, atau pulau kecil seperti Singapura. Bisa juga dipengaruhi oleh iklim, misalnya tropis atau subtropis atau empat musim, letak geografis. Demikian juga letak geografis dalam kaitannya dengan perhubungan dan lalu-lintas ikut berpengaruh, misalnya sistem atau orientasi perdagangan internasional. Faktor lain yang juga ikut membentuk atau berpengaruh adalah faktor kemasyarakatan, misalnya masyarakat homogen atau plural, multi-kultural, bisa juga masyarakat yang berkasta atau egaliter.

Sistem Perekonomian Indonesia adalah kajian tentang sistem perekonomian yang berkembang dalam praktek dalam sejarah perkembangan perekonomian Indonesia yang bisa ditelusuri sejak dari zaman pra kolonial, kolonial, terutama sejak abad ke 19 dan abad 20. Pada awal abad 19 yang berkembang adalah sistem ekonomi kolonial yang *laissez faire* yang berkembang menjadi sistem monopoli perdagangan oleh satu perusahaan dagang yaitu VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Namun perusahaan dagang swasta ini berakhir dengan kegagalan karena korupsi dari dalam. Sistem ini kemudian digantikan dengan sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) dimana negara bertindak sebagai perusahaan yang mengelola perkebunan

sejak 1930. Inti sistem ini adalah penerapan sistem upah menanam dan paksaan untuk bekerja di perkebunan. Ternyata sistem monopoli negara ini mendapat tentangan dari kaum liberal Belanda yang menginginkan agar yang tampil dalam kegiatan usaha adalah perusahaan-perusahaan swasta. Pada tahun 1870, lahir UU Agraria (*Agrarische Wet*) yang memberlakukan hak-hak individu untuk memiliki tanah dan membebaskan petani dari kewajiban tanam paksa agar mereka bisa mengerjakan tanahnya sendiri atau dengan sukarela menjual tanahnya dan bekerja sebagai butuh bebas. Sejalan dengan itu swasta diberi pula hak untuk memiliki tanah. Hak milik individu atas properti ini merupakan unsur utama dalam sistem kapitalisme atau sistem ekonomi liberal. Selain hak milik individual, berlaku pula hak milik komunal dan hak milik feodal yang mewakili negara. Mengacu pada teori model sistem Emil Salim, semasa VOC berlaku model sistem swasta, dan model sistem komanmping pada masa Tanam Paksa dan kemudian kembali pada model swasta sejak 1870 di zaman liberal. Disini Pemerintah Hindia Belanda kembali pada sistem *laissez-faire*. Disamping hak milik individu berlaku juga hak milik komunal berdasarkan hukum adat. Dan pada masa kemerdekaan lahir hak milik publik atau negara.

Sistem perkebunan swasta ini berkembang secara bertahap di berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Selain itu berkembang pula perkebunan rakyat yang sebenarnya sudah ada sebelum masa Tanam Paksa, bahkan menyaingi Sistem Tanam Paksa. Dari sistem liberal inilah berkembang dualisme antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang menjadi cikal bakal dari perekonomian rakyat, seperti perkebunan rakyat, pertanian rakyat, perikanan rakyat, pertambangan rakyat,

peternakan rakyat, pertambangan rakyat dan kerajinan rakyat.

Sistem liberal ini menghasilkan sistem ekonomi yang eksploitatif yang berorientasi ekspor, Ekspor terus berkembang untuk mendukung industrialisasi Eropa dan Belanda khususnya. Devisa yang diperoleh tidak ditanamkan kembali di Hindia Belanda, tapi ditransfer ke Belanda. Sedang rakyat sendiri dengan sistem liberal ini diberi beban pajak yang berat sehingga menimbulkan kemiskinan massal yang memuncak pada akhir abad ke 19 yang menimbulkan banyak pemberontakan lokal. Pemberontakan yang terbesar sesudah Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1925-1930 timbul sebagai Perang Aceh yang menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak walaupun pada akhirnya pemberontakan itu bisa dipadamkan pada tahun 1904.

Sementara itu kemiskinan massal di Hindia Belanda, telah membangkitkan kesadaran di kalangan liberal di parlemen Belanda. Dari kalangan liberal berdasarkan nalar etisnya timbul rasa utang budi karena menyadari bahwa kemakmuran di negara Belanda dibangun di atas kemiskinan rakyat yang mengalami eksploitasi. Sebagai reaksi terhadap kondisi kemerosotan kesejahteraan ini lahir politik liberal yang berorientasi pada kesejahteraan. Dalam konteks kolonial, kesejahteraan berarti kondisi di atas garis kemiskinan, sehingga berbeda dengan pengertian kesejahteraan dalam konteks negara maju, yaitu kondisi keberlembihan atau keserbacukupan (*affluance*).

Kesadaran etis itu kemudian diikuti dengan kesadaran politik yang menimbulkan dua gagasan besar. Pertama, adalah kebijaksanaan industrialisasi Hindia Belanda guna menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Tetapi sekaligus untuk membendung

dominasi barang-barang impor dari Jepang dengan membuat industri yang mampu menghasilkan barang-barang murah dan kompetitif terhadap produk industri Jepang. Gagasan ini tidak pernah dilaksanakan karena ditentang oleh golongan konservatif yang mewakili kepentingan perkebunan besar, karena industrialisasi bisa mengurangi suplai buruh murah yang dibutuhkan oleh perkebunan besar. Tapi hal ini justru mengandung hikmah karena Pemerintah Kolonial kemudian mendorong ekonomi rakyat yang bisa menandingi kekuatan ekonomi Cina Perantauan yang juga menyaingi kekuatan ekonomi Belanda. Kedua adalah menjalankan Politik Balas Budi (*Etische Pilitik*) melalui tiga program, pertama adalah pendidikan (*educatie*), pengairan (*irrigatie*) dan pemindahan penduduk dari Jawa-Madura ke Luar Jawa (*transmigratie*). Tentu saja kebijaksanaan itu mengandung kepentingan kolonial juga, misalnya dalam rangka penyediaan buruh murah bagi perkebunan. Namun Politik Etis adalah cikal bakal dari poliik kesejahteraan dan gagasan kesejahteraan sosial melalui kebijaksanaan pemerinah atau intervensi negara dalam sistem perekonomian.

Dari Politik Etis inilah lahir unsur baru dalam sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda, yaitu intervensi negara baik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan disamping untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik menghadapi perdagangan bebas, Dalam konteks sekarang, intervensi negara dipakai untuk menghadapi globalisasi perdagangan bebas.

Intervensi negara koilonial ini juga ikut mendorong timbulnya gerakan ekonomi di kalangan penduduk sebagaimana ditengarai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911 yang direstui

pemerintah. Namun sebelum lahirnya Politik Etis, kaum pribumi sudah melakukan respon sendiri secara swadaya dengan berdirinya Bank Tabungan Tolong Menolong (*Hulp en Spaarbank*) pada tahun 1896 atas prakarsa Patih Purwokerto Aria Wiriatmadja. Perkembangan politik kolonial ini juga menggambarkan terjadinya ayunan bandul jam dari ekonomi swata menjadi ekonomi negara dan kembali lagi ke ekonomi swata, tapi diikuti dengan intervensi negara untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Juga terjadinya ayunan dari non-intervensi ke intervensi pemerintah.

Intervensi itu tentu saja mengandung motif menjaga dan mengembangkan kepentingan ekonomi kolonial yang terkandung dalam Merkantilisme Kolonial. Tujuan Merkantilisme adalah membangun kekayaan negara, tapi dalam kasus ekonomi kolonial, negara itu adalah Nederland atau Belanda di Eropa dan bukannya negara Hindia Belanda, sebab kekayaan dari surplus devisa dari perdagangan internasional itu ditransfer ke Belanda.

Ciri menonjol dari kebijaksanaan ekonomi kolonial itu adalah pertama, mengekspor bahan-bahan mentah untuk mensuplai industri Eropa dan negara-negara penjajah. Kedua mengimpor barang-barang konsumsi ke negara jajahan. Tapi perdagangan internasional itu harus menghasilkan surplus devisa yang akan ditransfer kembali ke negara penjajah di Eropa.

Kebijaksanaan itu tidak menimbulkan kemakmuran negara terjajah, karena tenaga kerja petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan, sehingga tidak sempat mengembangkan pertanian rakyat, sebagaimana terjadi di Thailand yang tidak dijajah. Akibatnya tidak terjadi ketahanan dan kemandirian ekonomi dan tetap

terjadinya kemiskinan yang ditandai dengan pemberontakan dan radikalisme gerakan rakyat selama tiga dasawarsa abad' 20. Karena itu maka ketika terjadi kejatuhan produk pertanian dunia, maka harga bahan mentah dari negara jajahan termasuk Hindia Belanda ikut jatuh dan terjerumus ke dalam Depresi Besar perekonomian dunia 1929. Akibatnya terjadi pengangguran besar-besaran dan kemiskinan massal pada awal dasawarsa 30-an.

Kebijakan intervensi yang menonjol adalah pengembangan lembaga perkreditan rakyat dan koperasi. Kegiatan simpan pinjam sudah merupakan kegiatan rakyat sejak awal abad 20 yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten di Jawa. Tapi bisnis simpan pinjam ini kemudian diambil alih oleh Pemerintah Kolonial menjadi *volks-credietbank* karena anggapan bahwa bisnis ini bisa mendatangkan keuntungan besar, sehingga Pemerintah Kolonial bersedia mengalokasikan dana investasinya. Namun menurut Sumitro Djojohadikusumo, karena tiadanya kegiatan produktif rakyat yang menghasilkan pendapatan, maka perkreditan rakyat tidak efektif. Tanpa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah di sektor produktif, perkreditan tidak bisa membantu mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Ekonomi Dualistis

Pada tahun 1930, dalam pidato pengu-kuhannya sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden, Prof.Dr. J.H. Boeke seorang birokrat yang membina kegiatan koperasi dan ahli ekonomi Belanda mengemukakan tesisnya mengenai Ekonomi Dualistis di Hindia Belanda. Ekonomi Dualistis adalah dua sistem ekonomi yang bertentangan yang berada bersama pada suatu waktu tertentu, yaitu di Hindia

Belanda, sistem perekonomian pra-kapitalis yang mengadung corak feodal dan tradisional dan sistem ekonomi kapitalisme tinggi yang berlaku pada tahap kapitalisme awal dalam perekonomian kolonial. Ciri dari perekonomian dualistis itu antara lain adalah ko-eksistensi antara perekonomian desa dan kota. ekonomi barang dan ekonomi uang. Ekonomi berdasarkan kebutuhan sosial (*social needs*) dan kebutuhan ekonomi (*economic needs*) dan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan produksi untuk pasar. Dalam kaitannya dengan mentalitas, pelaku ekonomi tradisional dibimbing oleh adat-istiadat dan nilai-nilai tradisional, sedangkan ekonomi modern kapitalis dibimbing oleh rasionalitas ekonomi. Dalam aspek kelembagaan, ekonomi modern bekerja melalui organisasi ekonomi perusahaan, sedangkan ekonomi tradisional melalui lembaga sosial desa.

Menurut Boeke perekonomian tradisional tidak mungkin berkembang dan akan tetap berada dalam kemiskinan karena hambatan-hambatan yang dalam wacana ekonomi politik dewasa ini disebut sebagai hambatan struktural berupa masalah-masalah yang berada diluar kemampuan individu untuk mengatasinya. Dari segi tanah, lahan pertanian sempit karena kepadatan penduduk dan fragmentasi akibat sistem waris. Rakyat harus menyewa tanah dari tuan-tuan tanah feodal dengan sewa yang tinggi. Dari segi permodalan finansial, rakyat harus meminjam modal dengan bunga tinggi dari pembunga uang, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dari segi perdagangan, harga produk petani ditekan oleh tengkulak dengan sistem ijon. Hasilnya, tingkat pendapatan petani yang rendah bahkan kerap merugi. Dalam pengamatan Hatta tentang "Ekonomi Rakyat" pada tahun 1931, rakyat terpaksa harus menjual tenaga sebagai buruh dan yang sedikit memiliki

modal harus berdagang ke kota sebagai pedagang kecil.

Teori Boeke yang pesimis terhadap perekonomian tradisional pra-kapitalis yang tergolong dalam *dismal science* itu tidak sepenuhnya disetujui oleh rekan-rekan bahkan murid-muridnya sendiri, namun memberi isyarat terhadap perlunya peranan pemerintah dalam membongkar hambatan-hambatan struktural tersebut. Tapi oleh Hatta, politik ekonomi kolonial justru melanggengkan hambatan itu sehingga perekonomian rakyat senantiasa berada dalam bahaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Boeke bahwa sistem ekonomi kapitalis Barat hanya memberikan lebih banyak dampak negatif daripada positif, karena sistem ekonomi kapitalis hanya memberikan barang-barang dengan harga mahal tetapi tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Karena itu dibutuhkan kebijaksanaan pemerintah yang berbeda yang menghilangkan hambatan-hambatan bagi perekonomian rakyat untuk berkembang. Gagasan campur tangan ini tentu saja bertentangan dengan pandangan ekonomi liberal.

Dalam teori ekonomi pembangunan modern dikatakan bahwa rakyat miskin karena kelemahannya sendiri; "Rakyat miskin karena miskin". Tapi dalam pandangan kaum strukturalis, rakyat miskin karena dimiskinkan oleh eksploitasi yang terkandung dalam sistem ekonomi. Mereka tidak bisa berkembang karena hambatan-hambatan struktural yang tidak dapat mereka atasi sendiri kecuali dihilangkan oleh otoritas politik.

Penilaian Boeke terhadap lemahnya kemampuan rakyat untuk berkembang ternyata tidak seluruhnya benar. Karena rakyat justru merespon kondisinya melalui organisasi pergerakan yang sekarang disebut LSM (Lembaga Swadaya Masya-

rakat), misalnya Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang didirikan oleh sejumlah cendekiawan di bawah pimpinan Dr. Soetomo yang berdiri pada tahun 1933. PBI ini menggerakkan petani melalui usaha bersama berbentuk koperasi-koperasi petani yang memang berkembang pesat. Selain itu yang melakukan respon adalah keluarga dengan mengembangkan usaha-usaha rumah tangga di bidang pertanian dan kerajinan rakyat. LSM ini di masa itu memang tidak dihambat oleh Pemerintah karena melakukan politik kooperasi untuk menghindari tekanan dari Pemerintah Kolonial. Dari perkembangan ini lahir suatu unsur baru dalam sistem perekonomian, yaitu gerakan ekonomi rakyat melalui lembaga koperasi sebagaimana dianjurkan oleh Bung Hatta.

Baru pada tahun 1937 seorang pejabat Belanda dari Kementerian Kemakmuran merencanakan pengembangan industri rakyat, terutama dengan memperkenalkan teknologi baru misalnya mesin tenun tangan, hasil temuan Sekolah Tinggi Teknik Bandung (Sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB) dimana Bung Karmno belajar. Tapi ketika itu, Industri rakyat, dengan kekuatan swadaya telah berkembang cukup jauh secara swadaya dan gotong royong dengan tumbuhnya sentra-sentra industri kerajinan rakyat di berbagai kota dan pedesaan.

Menurut kajian historis G.H.A. Prince tentang "Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1990-1942" campur tangan atau intervensi Pemerintah Hindia Belanda dari perekonomian rakyat dinilai dari statemen Ratu Wilhelmina dalam suatu pidato awalnya di *States General* pada tahun 1901 yang mengumumkan akan dilakukannya kebijaksanaan baru Pemerintah jajahan untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan laporan mengenai kondisi yang mence-

maskan di sekitar merosotnya kesejahteraan rakyat semenjak berlakunya sistem *laissez faire* 1970-1990. Petunjuk ini ditindak-lanjuti oleh Menteri Urusan Kolonial Idenbur dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Rooseboom dengan mengalokasikan anggaran sebesar 30 juta gulden untuk membangun irigasi, emigrasi, pembangunan jalan, kredit pertanian dan pengembangan industri. Dalam tangka itu, Pemerintah membentuk komite yang terdiri dari para ahli yang mempelajari persoalan-persoalan ekonomi dan mencari solusinya. Hasil terpentingnya adalah memandang pentingnya sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Realisasinya adalah membentuk Kementerian Pertanian yang berperan melakukan riset, pendidikan dan perluasan kegiatan pertanian. Langkah ini sebenarnya adalah koreksi terhadap kebijaksanaan Pemerintah yang memusatkan perhatiannya kepada pengembangan perkebunan besar untuk ekspor yang menelantarkan produksi pangan, sehingga mengakibatkan kemerosotan kesejahteraan rakyat. Ahli ekonomi Belanda Gonggrijp tidak mengatakan tindakan itu sebagai kebijaksanaan, melainkan "keterlibatan" Pemerintah dalam perkembangan ekonomi.

Sungguhpun begitu, kebijaksanaan Pemerintah Kolonial itu belum bisa dikatakan menyimpang dari dan masih berada pada koridor *laissez faire*, walaupun pemerintah sudah melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Apa yang disebut sebagai intervensi negara baru terjadi pada tahun 1911 ketika Pemerintah mengeluarkan regulasi pelarangan ekspor beras yang berlaku hingga tahun 1918. Tapi kemudian larangan itu dicabut dan diganti dengan anjuran menanam padi gogo diluar lahan irigasi dan memerintahkan kepada perkebunan untuk menyediakan 25% lahan tanaman gula untuk menjadi sawah padi.

Intervensi ini berkelanjutan dengan keputusan dan tindakan pemerintah untuk membeli semua persediaan padi sebelum dibeli para tengkulak dan membentuk Pusat Pelayanan Distribusi yang melaksanakan pembelian dan melakukan operasi pasar pada masa harga maningkat di pasaran internasional yang memuncak pada tahun 1920.

Intervensi ini terjadi lagi ketika Hindia Belanda kebanjiran barang-barang dari Jepang, bukan dengan melarang impor, tetapi dengan melakukan industrialisasi pengganti impor. Pada tahun 1915 Pemerintah membentuk Komite Pengembangan Substitusi Impor di Hindia Belanda", baik dalam rangka membendung produk Jepang maupun mengurangi ketergantungan impor barang industri dari Eropa. Tetapi rencana industrialisasi besar-besaran ini menimbulkan konflik dengan kementerian-kementerian Pertanian, Industri dan Perdagangan yang lebih menghendaki pengembangan industri kecil.

Dari sini nampak terjadinya dualisme kebijaksanaan yang menyebabkan pembubaran komite itu. Sampai komite itu dibubarkan tidak banyak yang dilakukan oleh Pemerintah. Kebijaksanaan inilah yang dicoba diulang oleh Sitsen pada tahun 1937, tetapi dengan menekankan pengembangan industri kecil. Kebijaksanaan inipun sebenarnya merupakan tindakan "pahlawan kesiangan", karena tanpa kebijaksanaan itupun industri kecil telah jauh berkembang dengan cara swadaya.

Dalam masa 1900-1942, pada dasarnya Pemerintah Hindia Belanda telah meninggalkan *laissez faire* dengan berbagai kebijaksanaan yang terlibat atau melakukan intervensi yang mencakup kebijaksanaan-kebijaksanaan 1) peningkatan kesejahteraan, 2) pengelolaan distribusi beras, 3) industrialisasi substitusi impor, melawan

depresi ekonomi 1919-1921 dengan politik keseimbangan anggaran untuk meningkatkan anggaran pembangunan yang diimbangi dengan penghematan, perluasan pembangunan pertanian dan mengatasi dampak Depresi Besar 1929, dengan mempertahankan standar emas agar Pemerintah lebih leluasa dalam melakukan campur tangan di bidang ekonomi.

Pemikiran para sarjana Belanda yang birokrat, kebijaksanaan ekonomi dan perkembangan perekonomian Hindia Belanda di atas mempunyai pengaruh terhadap perumusan sistem perekonomian Indonesia di masa kemerdekaan. Tradisi gerakan koperasi sejak 1906 berikut dengan keswadayaan rakyat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang diamati oleh Hatta, agaknya menuntunnya untuk merumuskan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Kebijakan Pemerintah Kolonial untuk menguasai produksi dan distribusi beras yang merupakan kebutuhan pokok yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, demikian pula rencana Pemerintah Kolonial untuk melakukan industrialisasi substitusi impor, ikut mempengaruhi Hatta untuk merumuskan pasal 2 bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat rakyat banyak dikuasai oleh negara". Dan akhirnya juga sistem Tanam Paksa yang memerankan negara sebagai pengusaha, dan penguasaan negara terhadap pertambangan, memberikan inspirasi agar "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang merupakan ayat 3 pasal 33 UUD 1945. Berbagai politik kesejahteraan juga mengilhami dicantumkannya hak-hak sipil bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan peng-

hidupan yang layak bagi kemanusiaan". Inspirasi itu menimbulkan sikap melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dipandang bermanfaat bagi rakyat dan mengoreksi untuk diarahkan kepada kesejahteraan rakyat.

Pada masa kemerdekaan, Pemerintah, berdasarkan pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945 mulai membangun kerangka kelembagaan ekonomi, misalnya mendirikan bank sentral, tetapi yang kemudian berubah fungsinya menjadi bank pembangunan dan mendirikan perusahaan negara untuk menangani pertambangan emas di Ciloto yang diikuti dengan pendirian perusahaan-perusahaan negara lain untuk menggarap cabang-cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, termasuk perkreditan melalui lembaga perbankan. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai UU dan Peraturan Pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi. Di bidang eksekutif Pemerintah mendirikan Kementarian Keuangan dan Kementerian Kemakmuran yang kemudian dipecah-pecah menjadi sektor-sektor khusus, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan dan Pengerahan Tenaga Kerja Twu Perburuhan. .

Sesudah 1945 sampai dengan tahun 1966, telah berkembang tiga tahap dalam kecenderungan kebijaksanaan ekonomi. Dalam periode 1945-1950 terjadi percampuran antara liberalisme dan sosialisme dalam situasi di persimpangan jalan. Dalam tahun 1950-1959 terjadi kecenderungan kearah ekonomi liberal yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian, tanpa banyak intervensi negara. Perkembangan koperasi lebih digerakkan oleh gerakan koperasi daripada pembangunan koperasi oleh pemerintah. Sektor swasta memperoleh

kesempatan untuk berkembang, termasuk usaha kecil. Namun mulai nampak kesenjangan antara usaha kaum pribumi yang bermodal kecil dan etnis keturunan Cina. Dalam perekonomian lokal berkembang monopoli. Tapi sejak 1959 terjadi kecenderungan yang kuat ke arah sosialisme, yaitu sosialisme Indonesia, suatu bentuk sosialisme yang bercorak nasional. Kecenderungan ini ditandai oleh tiga gejala, intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, pengembangan badan usaha milik negara (BUMN) pembinaan koperasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pada tahun 1957 dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang digantikan dengan

BUMN karena swasta nasional belum mampu mengambil alih kegiatan usaha asing.

Pada masa liberal, telah muncul tiga pemikir ekonomi Indonesia yang memiliki kecenderungan yang berbeda. Hatta, lebih menekankan kepada pengembangan koperasi. Sumitro Djojohadikusumo lebih cenderung pada menampilkan peranan BUMN. Sedangkan Sjafruddin Prawiranegara menekankan preferensinya pada pengembangan sektor swasta, termasuk asing dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Perbedaan pandangan ketiga tokoh itu dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2 Spektrum Pemikiran tentang Strategi Pembangunan Indonesia.

Hatta	Sumitro	Sjafruddin
1. Pembangunan dengan sistem perencanaan sentral	1. Analisis kebijakan pembayaran ekonomi	1. Stabilitas ekonomi moneter ketat anti inflasi
2. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat	2. Industrialisasi substitusi impor	2. Anggaran berimbang
3. Peningkatan daya beli masyarakat	3. Nasionalisasi perusahaan asing	3. Swasembada pangan
4. Pengembangan industri rakyat	4. Anggaran berimbang dinamis (Keynesian)	4. Produksi berdasarkan prinsip keuntungan komparatif (Ricardian)
5. Mendorong gerakan koperasi	5. Bantuan luar negeri untuk pembangunan	5. Kredit pertanian dan industri kecil
6. Bantuan luar negeri untuk membangun industri dan alih teknologi	6. Pengembangan BUMN	6. Mengundang modal asing dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing
7. Pengendalian penduduk dan transmigrasi	7. Membina kekuatan ekonomi pribumi lewat perdagangan	7. Membangun sektor swasta
8. Membangun BUMN	8. Mendorong Koperasi	8. Membangun perkebunan untuk ekspor

Sumber: M. Dawam Rahardjo "Habibienomics, Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia" hal 28.

Nampak dalam tabel itu bahwa dalam setiap pemikiran terdapat campuran antara unsur-unsur swasta, koperasi dan negara. Hanya titik beratnya saja yang berbeda. Hatta misalnya punya skala prioritas koperasi, BUMN dan baru kemudian swasta. Sumitro urutannya adalah negara, koperasi dan baru swasta. Sedangkan Sjafruddin, swasta, koperasi dan baru kemudian negara. Kesemuanya mengacu kepada konteks perekonomian nasional Indonesia.

Dalam masa itu berbagai unsur aliran dan sistem ekonomi bersama-sama membentuk sistem perekonomian yang berlaku. Kesemuanya itu masuk ke dalam sistem perekonomian, melalui keputusan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang memuat kebijaksanaan ekonomi dan pengelolaan ekonomi. Namun tidak terekam secara komprehensif dalam suatu konsep. Sebagian nampak nyata dalam pembentukan lembaga, misalnya biro perencanaan dan kemudian badan perencanaan pembangunan yang menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif, misalnya rencana pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan delapan tahun.

Konsep yang secara jelas mencerminkan suatu sistem baru terjadi pada tahun 1966 dalam naskah Ketetapan (TAP) No. XXIII/MPRS/1966 yang melandasi pembangunan berencana jangka panjang. Konsep sistem itu tercermin dalam pertama, pemeranan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai penyusun Rencana Pembangunan setiap lima tahunan, kedua membangun tiga jenis lembaga pengelolaan ekonomi mikro, yaitu perusahaan swasta, perusahaan negara dan koperasi. Ketiga, UU yaitu UU Pokok Perkoperasian, UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diikuti dengan

peraturan-peraturan pemerintah dan instruksi presiden yang mewadai kebijaksanaan ekonomi nasional. Semenjak Pemerintahan Orde Baru 1965, telah terbit banyak UU, Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden.

Sekalipun mulai terbentuk kerangka besar suatu sistem perekonomian nasional, namun tidak jelas apakah sistem itu mengikuti suatu sistem ekonomi universal tertentu, misalnya sistem liberal kapitalis, sistem sosialis, sistem sosial demokrasi atau sistem ekonomi Islam. Berbagai unsur sistem itu teramu dalam sistem perekonomian nasional Indonesia yang belum terumuskan. Memang secara umum terkesan bahwa sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru itu adalah suatu bentuk sistem ekonomi liberal atau sistem perekonomian campuran (*mixed economy*) meminjam istilah Samuelson yang dalam disebut sebagai arus utama (*mainstream*). Jika ciri utamanya liberal maka yang menonjol adalah kebijaksanaan moneter (*monetary policy*). Tapi jika lebih sosial cirinya adalah kebijaksanaan fiskal (*fiscal policy*). Keduanya diikuti dalam sistem perekonomian yang berlaku. Baik Pemerintah maupun Bank Sentral berperan dalam mencapai tujuan dari sistem. Dalam sistem perekonomian itu terkandung pula unsur perencanaan sentral (*centralized planning*) yang dikombinasi dengan perencanaan regional (*regional planning*) tapi keduanya masih tergolong dalam sistem perencanaan yang memusat.

Dilihat dari hasil sistem itu, muncul tiga jenis hasil. Pertama adalah stabilitas ekonomi. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan ketiga adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tapi dilihat dari segi kelembagaan, mula-mula yang menonjol adalah peran badan perencanaan pembangunan pusat. Tapi kemudian

terutama sejak 1990, terjadi proses liberalisasi ekonomi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pragmatis.

Baru pada tahun 1979, Emil Salim mencoba mengidentifikasi sistem perekonomian Indonesia dengan nama Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Tapi Emil Salim tidak memperinci substansi dan detail dari SEP itu. Pada tahun 1980, Mubyarto mencoba mengidentifikasi ciri-ciri SEP yaitu Pertama, Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. Kedua, kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat kearah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai azas-azas kemanusiaan. Ketiga, Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. Keempat koperasi merupakan soko guru perekonomian dan bentuk yang paling kongkret dari usaha bersama. Kelima adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjadi keadilan ekonomi dan sosial.

Sebenarnya Mubyarto sudah mencoba melukiskan berbagai aspek dari sistem perekonomian nasional itu dalam bukunya "Sistem Ekonomi Pancasila" (1987). Misalnya landasan teoritis, landasan moral, landasan moral, politik ekonomi, tujuan sistem dan arah kebijaksanaan ekonomi nasional. Namun uraian itu hanyalah pengumpulan berbagai artikel yang pernah ditulisnya, dan belum bisa dijadikan pedoman operasional dalam menjalankan sistem perekonomian nasional. Namun pedoman operasional kebijaksanaan ekonomi telah dirumuskan dalam seminar ISEI mengenai "Penjabaran Demokrasi",

nama lain dari Sistem Perekonomian Indonesia yang lebih operasional.

Penutup

Dalam penyusunan konsep sistem perekonomian Indonesia yang perlu dilakukan adalah sebuah kajian historis-empiris mengenai terbentuknya sistem perekonomian Indonesia dalam suatu evolusi yang bisa dipakai sebagai legitimasi bagi tepat dan efektifnya sistem tersebut. Sehingga tidak menjadi suatu utopia yang tidak realitis (*unrealistic utyopia*). ●

Daftar Pustaka

- Hatta, Moh. 1967. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Djambatan.
- Lewis, Athur. 2003. *The Theory of Economic Growth*. London: Taylor and Francis.
- Raharjo, Dawam. 2004. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media
- Salim, Emil. 1979. *Jurnal ilmiah. Prisma*
- Tap MPRS. No. XXIII/1966. tentang *Pembaharuan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*.
- Undang-Undang Dasar 1945. dan Penjelasannya, Pasal 27 (ayat 2) dan Pasal 33 serta pasal 34.
- UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Penanaman Modal dalam Negeri. Tahun 1968.
- Undang-Undang tentang Peraturan Pengelolaan Ekonomi (Economic Governance) dan etika ekonomi.

